

BAB II

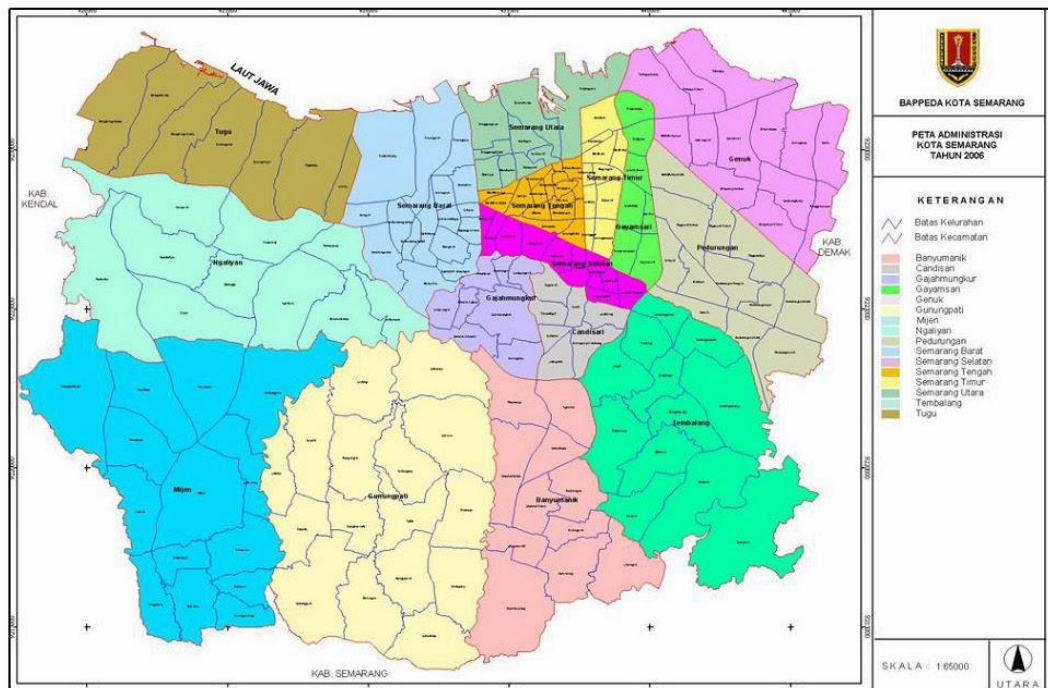
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Deskripsi Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang terletak antara garis $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan sebelah utara dengan dibatasi oleh Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 km, sebelah barat adalah dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 m sampai dengan 348 m di atas garis pantai. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 2.1 dibawah ini :

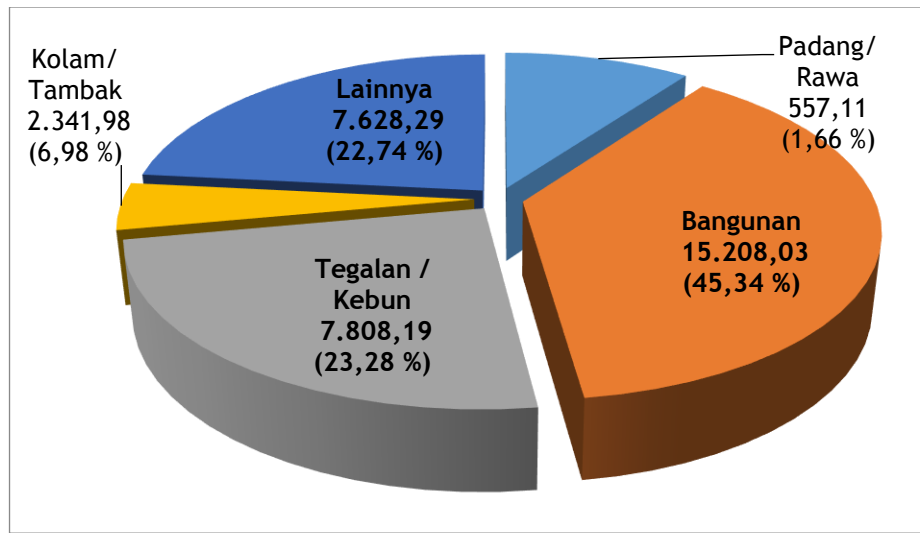
Gambar 2.1 Peta Kota Semarang Tahun 2017



(Sumber: bappeda.semarangkota.go.id di akses pada tanggal 19 September 2017 pukul 22.49)

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 Km². Berdasarkan pembagiannya terdiri dari tanah sawah seluas 38,27 Km² (10,24 %) dan tanah kering luas 335,43 (89,76 %). Hal tersebut dapat dilihat dari grafik 2.1 berikut ini:

Grafik 2.1 Penggunaan Lahan di Kota Semarang

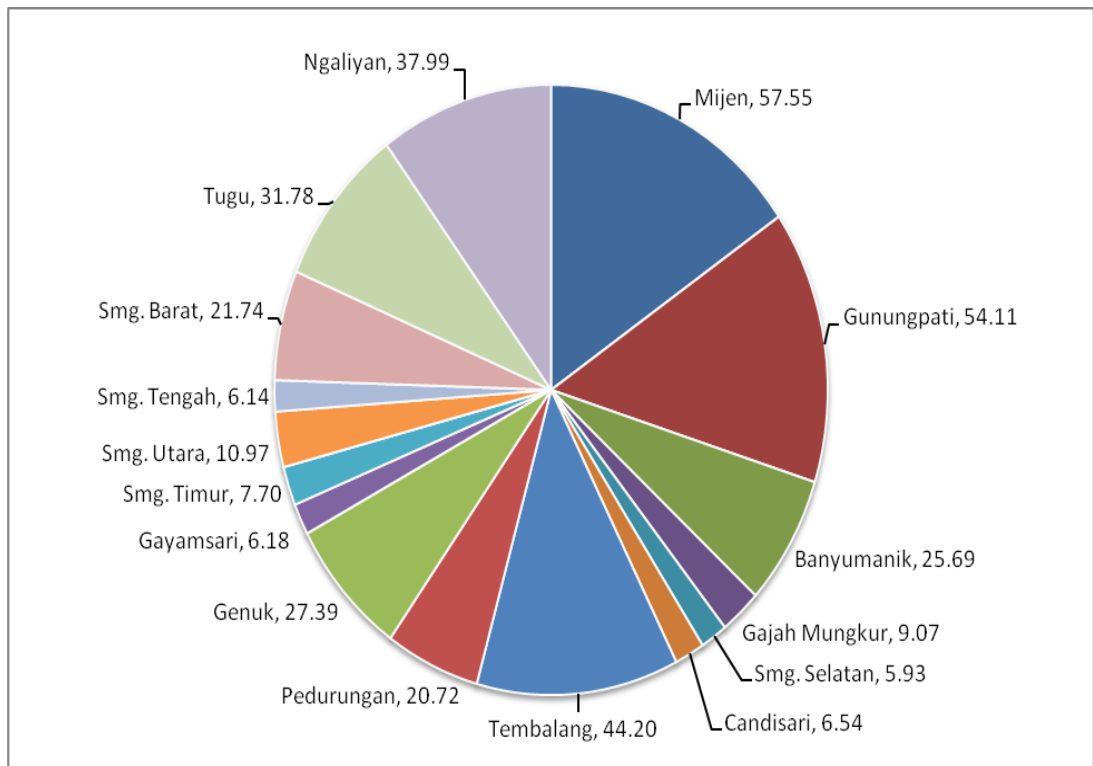


Sumber : Kota Semarang Dalam Angka 2014

Grafik 2.1 dapat diketahui bahwa, penggunaan lahan tanah kering di Kota Semarang terbanyak untuk bangunan termasuk pekarangan sebesar 40,70 %, untuk tegalan dan kebun 20,89 %, tambak/ kolam 6,27 %, padang gembala dan rawa 10,24 %, dan untuk penggunaan tanah kering lainnya sebesar 20,41 %.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dimana kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan yang sedikit dan banyak serta kecamatan yang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda/ Kota Semarang memiliki wilayah yang cukup luas dan juga memiliki kelurahan yang cukup banyak. Berikut ini grafik 2.2 menggambarkan luas wilayah administrasi Kota Semarang :

Grafik 2.2 Wilayah Administrasi Kota Semarang (Km²)



Sumber : Kota Semarang dalam Angka Tahun 2014

Grafik 2.2 dapat disimpulkan bahwa, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km².

Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan wilayah kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 Km².

2.1.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sebanyak 1.592.729 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 791.653 jiwa dan perempuan sebanyak 801.076 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Semarang, maka, kepadatan penduduk Kota Semarang juga meningkat. Disamping karena kelahiran, kepadatan penduduk yang cenderung meningkat juga dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, dimana konsekuensi peningkatan daya tarik kota metropolitan Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus sebagai pusat perekonomian dan pusat pendidikan, seperti terlihat pada tabel 2.1 dan grafik 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2010 – 2014

No	Tahun	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2010	758.267	769.116	1.527.433	1,36
2	2011	767.884	776.474	1.544.358	1,11
3	2012	775.793	783.405	1.559.198	0,96
4	2013	781.176	790.929	1.572.105	0,83
5	2014	787.705	797.201	1.584.906	0,81
6	2015	791.653	801.076	1.592.729	0,59

Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id> di akses tanggal 19 September 2017 pukul 22.22

Dari Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa, periode 6 tahun terakhir, 2010 – 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,94 % per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kota Semarang menunjukkan penurunan selama periode 2010 – 2015, pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 sebesar 1,36 %, selanjutnya mengalami penurunan terus secara signifikan setiap tahunnya hingga tahun 2015 pertumbuhannya mencapai sebesar 0,59 %.

2.2. Deskripsi BAPPEDA Kota Semarang

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Jadi, tugas pokok Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di atas memberikan gambaran tentang ruang lingkup dinas tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program TMMD di Kota Semarang. Bappeda bertugas menyusun dan melaksanakan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bappeda mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang

- perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanakan pelayanan penunjang dalam daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Penyusunan rencana program dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan.
 - g. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;

Berdasarkan fungsi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah diatas, dapat dilihat bahwa fungsi – fungsi yang diselenggarakan tersebut merupakan kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung untuk melaksanakan tugas pokok yang sudah disebutkan sebelumnya.

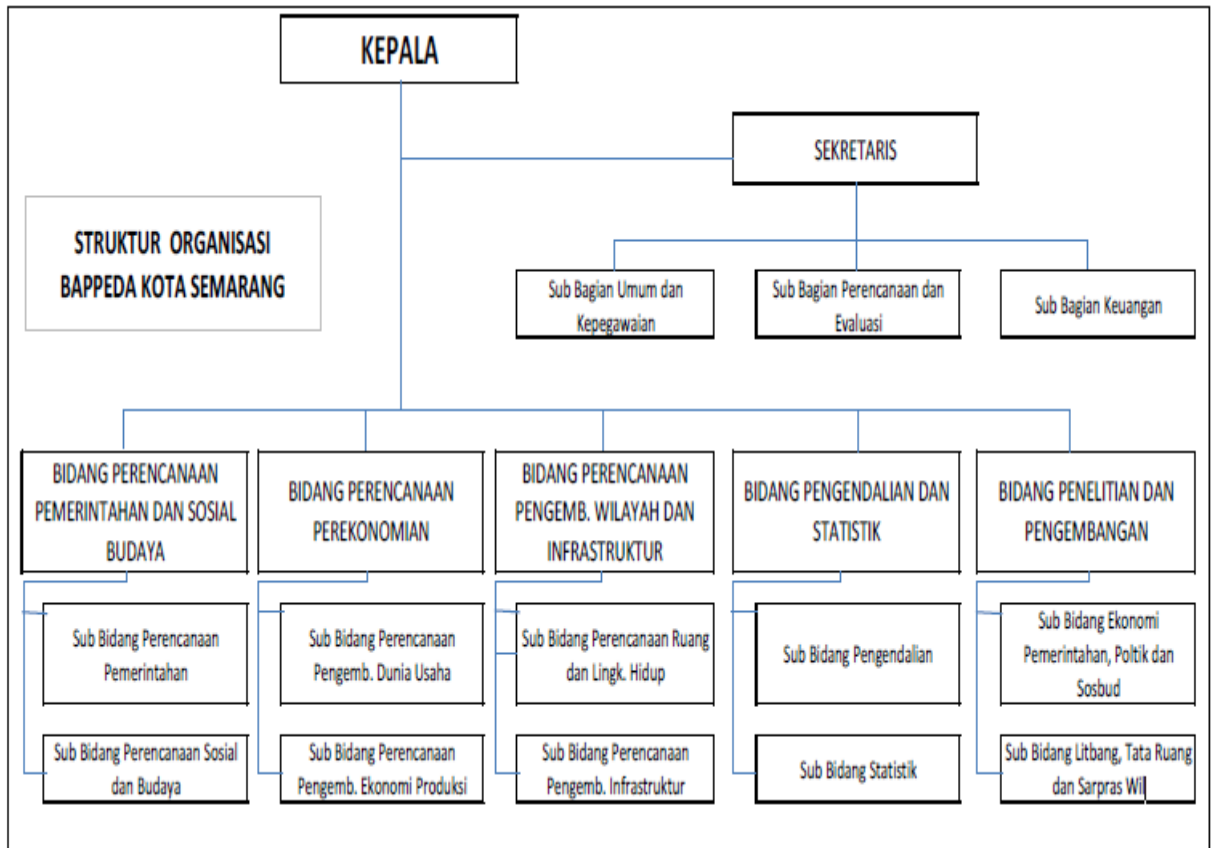
2.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
- Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
4. Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri dari :
- Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha;
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi.
5. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, terdiri :
- Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.
6. Bidang Pengendalian dan Statistik, terdiri dari :
- Sub Bidang Pengendalian;
 - Sub Bidang Statistik.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik Sosial dan Budaya;
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2 Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Bappeda Kota Semarang



Berdasarkan tugas dan fungsi dari Bappeda, dapat diketahui bahwa dalam setiap perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah, Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan yang masing – masing ditangani oleh bidang – bidang yang tertera pada susunan organisasi diatas.

2.3 Deskripsi Komando Distrik Militer (KODIM) 0733 BS/Semarang

2.3.1 Tugas Pokok Kodim 0733 BS/Semarang.

Kodim 0733 BS/Semarang yang berdiri sendiri langsung di bawah Komando Daerah Militer IV/Diponegoro. Markas Kodim 0733/Semarang terletak di Jl. Pemuda No. 153 Kota Semarang.



Gambar 2.3 Kodim 0733 BS/Semarang (dokumentasi 11 Oktober 2017)

Sesuai dengan Perkasad Nomor/111 / XII / 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang tugas pokok Kodim adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan didarat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem. Adapun pembagian tugas pokok bidang Staf kodim sebagai berikut :

a. Bidang Intelijen

1. Menyelenggarakan fungsi Intelijen untuk kepentingan territorial meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terbatas.
2. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memimpin pengumpulan keterangan dibidang geografi (Termasuk Cuaca dan Medan), demografi, kondisi sosial (Ipoleksosbudhankam, Maupun tentang ancaman dan - gangguan didaerahnya.
3. Membuat analisa Daerah Operasi.
4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan inteljen untuk kepentingan territorial.
5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Menyiapkan laporan sesuai tugasnya kepada satuan atas.

b. Bidang Operasi

1. Menyelenggarakan fungsi operasi yang meliputi organisasi, operasi dan latihan.
2. Melaksanakan perencanaan pemeliharaan kekuatan dan kemampuan kesatuan, pelaksanaan latihan dan pelaksanaan operasi tempur serta territorial.
3. Melaksanakan pengawasan Staf, yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
4. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim sesuai bidang tugasnya.
5. Menyiapkan laporan kepada satuan atas.

c. Bidang Personel

1. Pembinaan Kekuatan Militer/Sipil dan cadangan TNI AD serta unsur perlawanan rakyat.
2. Pembinaan kesejahteraan Moril, Disiplin, Tata tertib dan hukum.
3. Perawatan kesehatan dan rokhani.
4. Administrasi umum dan dalam.
5. Dinas kegarnizunan TNI AD.

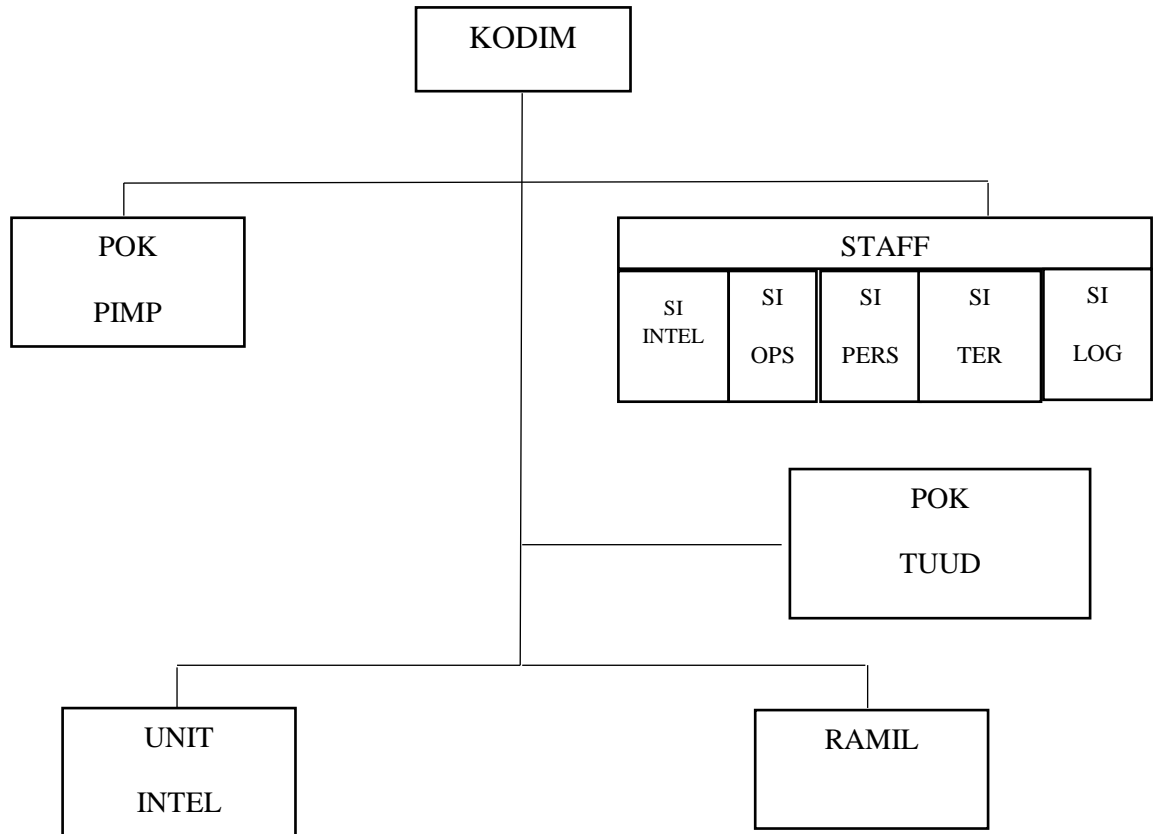
d. Bidang Logistik

1. Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan kegiatan pembekalan, angkutan, pemeliharaan bangunan/tanah dan materiil serta pelaporan SIMAK BMN.
2. Meyelenggarakan penyediaan kemudahan akomodasi bagi personel militer didaerahnya.
3. Menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan pembinaan logistic wilayah didaerahnya.
4. Melaksanakan pengawasan Staf, yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim sesuai bidang tugasnya.
6. Menyiapkan laporan kepada satuan atas.

e. Bidang Teritorial :

1. Menyelenggarakan fungsi teritorial yang meliputi kegiatan pembinaan kemampuan teritorial, Bhakti TNI, Pembinaan Perlawanan Wilayah dan Komunikasi Sosial.
2. Menyelenggarakan perencanaan kegiatan Pembinaan Teritorial.
3. Menyelenggarakan perencanaan pembinaan Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial untuk menciptakan Ruang, Alat dan kondisi Juang yang tangguh diwilayahnya.
4. Melaksanakan pendataan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) serta sarana dan Prasarana lainnya untuk menyelenggarakan perencanaan pembinaan komponen cadangan dan pendukung.
5. Menyiapkan Petunjuk Teritorial (Jukter), Analisa Potensi Wilayah (Anpotwil), Analisa Potensi Pertahanan (Anpothan) dan Rencana Pembinaan Teritorial (Renbinter).
6. Melaksanakan pengawasan Staf tentang kegiatan pembinaan teritorial yang diprogramkan.
7. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim sesuai bidang tugasnya.
8. Menyiapkan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada satuan atas.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Kodim 0733/ BS Semarang



Sumber : Laporan Korps Kodim 0733/ BS Semarang 2015

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Kodim 0733/BS Semarang dapat diketahui bahwa menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial yang meliputi kegiatan pembinaan kemampuan teritorial, Bhakti TNI, Pembinaan Perlawanan Wilayah dan Komunikasi Sosial untuk menyiapkan wilayah pertahanan didarat dan menjaga keamanan wilayahnya yang masing – masing ditangani oleh bidang – bidang yang tertera pada susunan organisasi di atas. Kegiatan program TMMD di Kota Semarang masuk dalam staff Bhakti TNI dengan maksud dan tujuan :

1. Membantu mempercepat pelaksanaan pembangunan.
2. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
3. Membangun dan menumbuhkembangkan semangat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan masyarakat, khususnya para pemuda dan pemuka masyarakat.
4. Turut serta melatih jiwa kemanusiaan para pemuda, khususnya para penganggur dan putus sekolah.

Sasaran Kegiatan Program TMMD adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pembangunan infrastuktur di lokasi kantong kemiskinan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
2. Terciptanya kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam rangka membangun Sishankamrata.
3. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang fisik dan non fisik guna lebih memantapkan kemanunggalan TNI – Rakyat.
4. Melatih adaptasi prajurit TNI dengan adat istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat di lokasi.

Fasilitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada di Kodim 0733/BS Semarang dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Personel, Sarana, dan Prasarana Kodim 0733/BS

Semarang

Personel	Senjata	Kendaraan	Alhub / Aloptik / Alsintor / Alat Lain
Letnan Kolonel (1)	Senjata Laras Panjang (15)	Truk 2 1/5 Ton (1)	RAD SSB (4)
Mayor (1)	Senapan (31)	Truk ¼ Ton (3)	TRO 24 MS (1)
Kapten (5)		Truk ¼ Ton (Patroli) (1)	Telepon (3)
Pembantu Letnan Satu (9)		Truk ¾ Ton (1)	Faximile (1)
Sersan Mayor (5)		Bus Kecil (1)	HT (20)
Sersan Kepala (3)		Ambulance (1)	Repiter (1)
Sersan Satu (8)		Sepeda Motor (36)	OHP (1)
Kopral (14)		Speed Boat (1)	Sound Syistem (1)
PNS Golongan II (13)			Komputer (8)
			MS. TIK 26"-27" (6)
			MS. Stensil (1)
			MS. Fotocopy (1)
			Genset 5kv (1)
			TV 21" (1)

Sumber : Laporan Korps Kodim 0733/ BS Semarang 2015

Dari tabel 2.5 dapat diketahui bahwa, personel yang ada di Kodim berjumlah 59 orang dengan jabatan dari PNS golongan II sampai Letnan Kolonel. Jumlah personel terbanyak adalah Kopral dengan 14 orang sedangkan paling sedikit adalah Mayor dan Letnan Kolonel masing – masing dengan 1 orang. Senjata yang ada di

Kodim berjumlah 46 buah senjata yang didominasi dengan senapan sebanyak 31 buah. Sedangkan kendaraan yang ada di Kodim berjumlah 45 buah yang didominasi dengan kendaraan sepeda motor sebanyak 36 buah selain itu ada truk, ambulance, bus, dan speed boat. Fasilitas lain yang ada di Kodim yang terbanyak adalah komputer yang berjumlah 8 unit.

2.4 Deskripsi Sekretariat Daerah Kota Semarang

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang tertuang pada pasal 2 Sekretariat daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- c. Penyelenggaraan koordinasi tugas perangkat daerah;
- d. Penyelenggaraan kebijakan daerah;
- e. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah;
- f. Pembinaan aparatur perangkat daerah;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;

- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi sekretariat daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi dari sekretariat daerah penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Ditungjang dengan fungsi – fungsi yang telah disebutkan di atas.

2.4.1 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekertariat Daerah Kota Semarang, terdiri dari :

- 1. Sekertariat Daerah
- 2. Asisten Administrasi Pemerintahan, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Administrasi Kewilayahan;
 - 2. Subbagian Pemerintahan Umum; dan
 - 3. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan;
 - 2. Subbagian Politik dan Fasilitasi Kepala Daerah; dan
 - 3. Subbagian Kerjasama Antar Lembaga.
 - c. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perancangan Produk Hukum Pengaturan dan Dokumentasi;
 - 2. Subbagian Perancangan Produk Hukum Penetapan; dan

3. Subbagian Bantuan Hukum dan HAM.
- d. Bagian Organisasi, terdiri dari :
 1. Subbagian Kelembagaan;
 2. Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan
 3. Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Analisa Jabatan.
3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 1. Subbagian Bina Usaha;
 2. Subbagian Bina Produksi; dan
 3. Subbagian Potensi Ekonomi dan BUMD.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Pengendalian; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 1. Subbagian Pelayanan Sosial;
 2. Subbagian Kesehatan dan Keluarga; dan
 3. Subbagian Agama, Pendidikan dan kebudayaan.
 - d. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari :
 1. Subbagian Pembinaan dan Pengendalian Pengadaan;
 2. Subbagian Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi; dan

3. Subbagian Layanan Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya.
4. Asisten Administrasi Umum, membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - a. Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari :
 1. Subbagian Pemberitaan;
 2. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
 3. Subbagian Protokol.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha Kepala Daerah dan Staf Ahli;
 2. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Daerah; dan
 3. Subbagian Penatausahaan Keuangan.
 - c. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :
 1. Subbagian Analisa Kebutuhan;
 2. Subbagian Pengadaan dan Distribusi; dan
 3. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - d. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari :
 1. Subbagian Transportasi;
 2. Subbagian Pemeliharaan Gedung; dan
 3. Subbagian Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung.
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Staf Ahli.

Sekretariat Daerah dibagi menjadi 6 bagian struktur organisasi yang meliputi Sekretariat Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan, Asisten Administrasi

Ekonomi, Asisten Administrasi Umum, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Staf Ahli. Dalam pelaksanaan program TMMD yang sebelumnya ditangani oleh Bapermas dan KB setelah ada SOTK tahun 2017 pelaksanaan program TMMD dilimpahkan kepada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan.

2.4.2 Deskripsi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang

Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbagian Administrasi Kewilayahan, Subbagian Pemerintahan Umum, dan Subbagian Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bagian tata pemerintahan;
- h. Pelaksanaan kegiatan subbagian administrasi kewilayahan, subbagian pemerintahan umum, dan subbagian pemberdayaan masyarakat;

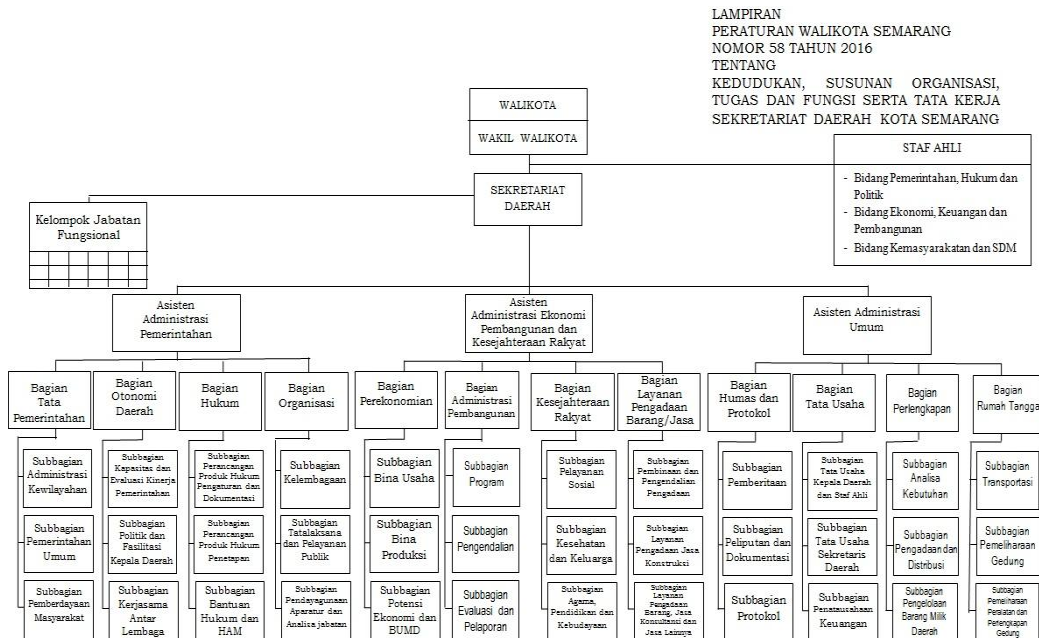
- i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bagian tata pemerintahan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bagian tata pemerintahan;
- k. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas :

- a. Subbagian Administrasi Kewilayahan;
- b. Subbagian Pemerintahan Umum; dan
- c. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Tata Pemerintahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program TMMD di Kota Semarang dengan tugas pokok, fungsi, serta bagian yang telah disebutkan di atas.

Gambar 2.5 Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang



Sumber : (<http://www.semarangkota.go.id/main/menu/12/struktur-organisasi/sekretariat-daerah> di akses tgl 19 November 2017 pukul 21.00)

Berdasarkan dari penjelasan tentang Sekretariat Daerah Kota Semarang, maka dapat digambarkan struktur organisasi Sekretariat Daerah di atas.

2.5 Deskripsi Kecamatan Gunung Pati

Tahun 2015 merupakan tahun akhir pelaksanaan Renstra 2010-2015. Visi adalah keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sejalan dengan visi pada RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015. Visi Kecamatan Gunungpati periode tahun 2010-2015 adalah “Pelayanan Prima, Lingkungan Nyaman dan Masyarakat Partisipatif”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi SKPD. Misi

Kecamatan Gunungpati pada RENSTRA tahun 2010-2015 ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Meningkatkan kebersihan lingkungan;
- c. Memberdayakan Masyarakat dalam Pembangunan.

Pada saat penyusunan buku laporan evaluasi kinerja ini juga sedang disusun Renstra SKPD tahun 2016-2021, dalam sistematika penyusunan Renstra tersebut Visi Misi SKPD merupakan Visi Misi kepala daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih (Visi Misi Semarang Hebat) yaitu “**Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera**” Dalam visi tersebut mengandung makna dan tujuan yaitu penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan iklim investasi, peningkatan sektor perdagangan dan jasa dan industri olahan, peningkatan indeks pemberdayaan gender, penurunan angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia yang sejajar/lebih tinggi dengan kota lain.

Visi Semarang Hebat dijabarkan lebih lanjut dalam 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
2. Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, terbagi atas berbagai sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan RENSTRA adalah sebagai berikut :

Misi : Meningkatkan kualitas pelayanan,

Tujuan : Memberikan pelayanan mudah, murah dan cepat untuk masyarakat.

Misi : Meningkatkan kebersihan lingkungan,

Tujuan : Meningkatkan cakupan kebersihan wilayah dan titik pantau adipura.

Misi : Memberdayakan Masyarakat dalam Pembangunan,

Tujuan : Meningkatkan jumlah kelompok dan kegiatan kemasyarakatan yang aktif serta cakupan pembangunan wilayah.

2.5.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di lingkungan Kecamatan Gunungpati sampai dengan bulan Desember tahun 2015 sebanyak 119 orang, terbagi atas 118 orang PNS dan 1 orang CPNS dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Sumber Daya Pegawai di Lingkungan Kecamatan

Gunung Pati

No.	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan					Golongan				Eselon			
	Laki – Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	IV	III	II	I	IIIa	III b	IV a	IVb
1.	Laki – Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	IV	III	II	I	IIIa	III b	IV a	IVb
2.	83	36	5	54	7	48	5	4	97	17	1	1	1	21	70
Jumlah	119		119					119				93			

Sumber : Laporan Evaluasi Kemiskinan Kecamatan Gunung Pati Tahun 2016

Dari data diatas dapat diketahui bahwa, jumlah pegawai di Kecamatan Gunung Pati 119 orang yang mayoritas pegawainya 69,7% adalah laki - laki sebanyak 83 orang. Tingkat pendidikan terbanyak 45,3% adalah S1 dengan 54 orang sedangkan paling sedikit 4,2% adalah S2 dan SLTP masing – masing dengan 5 orang. Golongan PNS paling banyak 81,5% adalah Golongan III dengan jumlah 97 orang, sedangkan paling sedikit 0,8% adalah golongan I dengan jumlah 1 orang. Jabatan Eselon di dominasi 58,8% dengan eselon IV b dengan jumlah 70 orang

Data kepegawaian tersebut dirinci per kelurahan sebagai berikut :

**Tabel 2.4 Jumlah Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan Se-Kecamatan
Gunungpati Tahun 2015**

NO	INSTANSI	JUMLAH 2015			
		TPHL	CPNS	PNS	TOTAL
1.	Kecamatan	-	1	23	24
2.	Pakintelan	-	-	6	6
3.	Mangunsari	-	-	4	4
4.	Plalangan	-	-	5	5
5.	Gunungpati	-	-	5	5
6.	Nongkosawit	-	-	6	6
7.	Pongangan	-	-	6	6
8.	Ngijo	-	-	6	6
9.	Patemon	-	-	6	6
10.	Sekaran	-	-	6	6
11.	Sukorejo	-	-	5	5
12.	Sadeng	-	-	7	7
13.	Cepoko	-	-	6	6
14.	Sumurrejo	-	-	7	7
15.	Jatirejo	-	-	7	7
16.	Kalisegoro	-	-	6	6
17.	Kandri	-	-	7	7
	JUMLAH	-	1	118	119

Sumber : Laporan Evaluasi Kemiskinan Kecamatan Gunung Pati Tahun 2016

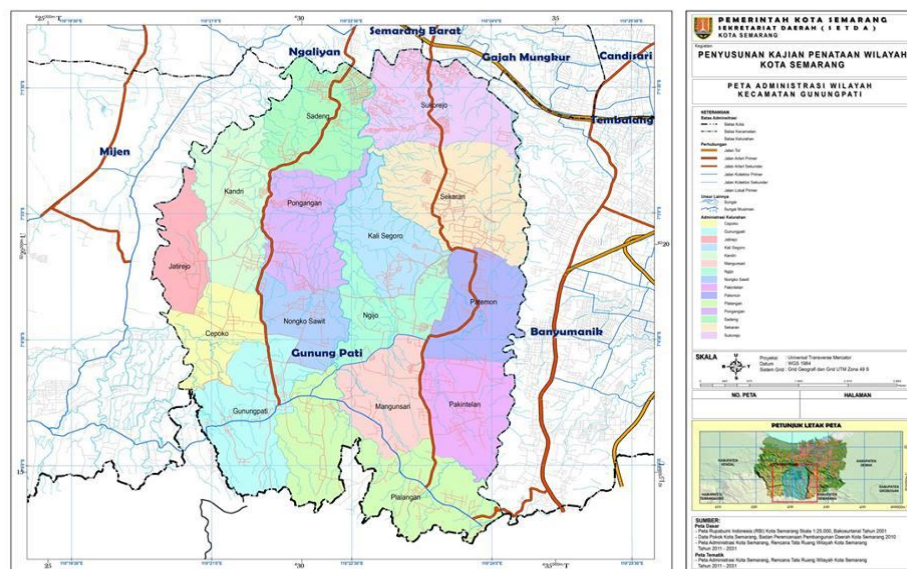
2.5.2 Gambaran Umum Kecamatan Gunung Pati

Kecamatan Gunungpati merupakan kecamatan yang berada di bagian selatan Kota Semarang, berada di ketinggian 259 meter dengan curah hujan rata-rata 1,853 mm/bulan. Luas wilayah keseluruhan sebesar 5.399,085 Ha terbagi atas 16 kelurahan, 91 RW dan 457 RT.

Kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai lahan konservasi ini memiliki batas-batas :

- Sebelah utara : Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kecamatan Banyumanik
- Sebelah barat : Kecamatan Mijen dan Kabupaten Kendal

Gambar 2.6 Peta Kecamatan Gunungpati



Sumber : Laporan Evaluasi Kemiskinan Kecamatan Gunung Pati Tahun 2016

Sementara itu, orbitrasi Kecamatan Gunungpati dengan beberapa obyek pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Jarak dengan Kantor Gubernur : 22 km
- Jarak dengan Kantor Walikota : 22 km
- Jarak dengan Kabupaten Semarang : 3 km
- Jarak dengan Kabupaten Kendal : 7 km

2.5.3 Kondisi Demografis

Data kependudukan teradministrasi dengan baik oleh Kasi Kependudukan Kecamatan Gunungpati. Data tersebut berasal dari laporan kependudukan petugas kelurahan Sekecamatan Gunungpati. Jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar 78.643 jiwa terdiri atas laki-laki sebesar 39.397 jiwa dan perempuan sebesar 39.246 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Per Kelurahan Se-Kecamatan Gunungpati
Tahun 2015**

No	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK 2015		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Pakintelan	2.363	2.238	4.601
2	Mangunsari	2.233	2.405	4.638
3	Plalangan	1.804	1.813	3.617
4	Gunungpati	2.249	2.344	4.593
5	Nongkosawit	2.673	2.657	5.329
6	Pongangan	1.514	1.585	3.099
7	Ngijo	2.128	2.230	4.358
8	Patemon	5.722	5.357	11.079
9	Sekaran	3.389	3.401	6.790
10	Sukorejo	1.419	1.393	2.812
11	Sadeng	939	943	1.882
12	Cepoko	2.890	2.942	5.832
13	Sumurrejo	1.556	1.503	3.059
14	Jatirejo	1.982	1.908	3.890
15	Kalisegoro	3.197	3.275	6.472
16	Kandri	3.340	3.252	6.592
	JUMLAH	39.397	39.246	78.643

Sumber : Laporan Evaluasi Kemiskinan Kecamatan Gunung Pati Tahun 2016

Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa, penduduk laki – laki terbanyak 14,5% berada di Kelurahan Patemon sebanyak 5.722 jiwa, sedangkan paling sedikit 2,8% adalah Kelurahan Sadeng yang berjumlah 939 jiwa. Jumlah penduduk perempuan paling banyak 13,6% berada di Kelurahan Patemon sebanyak 5.357 jiwa, sedangkan paling sedikit 2,4% berada di Kelurahan Sadeng yang berjumlah 943 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Gunung Pati 14% berada di Kelurahan Patemon

dengan jumlah 11.079 jiwa dan paling sedikit 2,3% berada di Kelurahan Sadeng dengan jumlah 1.882 jiwa.

Berkaitan dengan bidang sosial, berikut ini adalah data warga miskin Kecamatan Gunungpati tahun 2015:

Tabel 2.6 Data Warga Miskin Kecamatan Gunungpati Bulan Desember Tahun 2015

NO	KATEGORI	JUMLAH
1.	Jumlah KK Miskin	6.302 KK
2.	Jumlah warga miskin	19.872
3.	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	362
4.	Keluarga yang tidak berumah layak	-
5.	Keluarga yang bermasalah psikologis	9
6.	Keluarga rentan	-
7	Korban bencana alam	47

Sumber : Laporan Evaluasi Kemiskinan Kecamatan Gunung Pati Tahun 2016

Dari tabel 2.6 dapat disimpulkan bahwa dari 78,643 jiwa penduduk di Kecamatan Gunung Pati mempunyai presentase 25,2% jumlah penduduk termasuk dalam kategori warga miskin.